

Editor:
Ivan Yulivan
Budi Pramono



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Edisi 2



Tim Penulis:

Lukman Yudho Prakoso | Asep Iwa Soemantri | Agus Adriyanto

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Edisi 2

Tim Penulis:

Lukman Yudho Prakoso | Asep Iwa Soemantri | Agus Adriyanto



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA EDISI 2

Tim Penulis:

**Lukman Yudho Prakoso
Asep Iwa Soemantri
Agus Adriyanto**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Ivan Yulivan
Budi Pramono**

ISBN:

**978-623-500-194-4
978-623-500-195-1 (PDF)**

Cetakan Pertama:

Mei, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Buku ini, "Kebijakan Pertahanan Negara", disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar, prinsip, dan implementasi kebijakan pertahanan di Indonesia. Kebijakan pertahanan bukan hanya urusan militer atau keamanan semata, melainkan pondasi bagi berbagai kebijakan negara yang terkait dengan kementerian dan lembaga lainnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pertahanan sangat penting bagi semua kalangan, baik praktisi, akademisi, maupun pembuat kebijakan.

Kebijakan Pertahanan Negara adalah serangkaian kebijakan yang dirancang untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan seluruh warga negara dari berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari strategi militer, pengembangan industri pertahanan, hingga kerjasama internasional dalam bidang keamanan.

Dalam penyusunan buku ini, kami berusaha merangkum berbagai teori dan konsep kebijakan yang relevan, disertai dengan studi kasus dan analisis praktis untuk memberikan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan pertahanan di lapangan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi berbagai kalangan:

Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pembacanya, dan dapat menjadi pijakan dalam menciptakan kebijakan pertahanan yang lebih baik dan lebih kuat untuk masa depan Indonesia yang aman dan sejahtera.

Hormat kami,

Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso, S.I.P., M.A.P., M.Tr.Opsla., IPU., ASEAN Eng

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KEBIJAKAN KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG PERTAHANAN	1
A. Dinamika Lingkungan Strategis	2
B. Tantangan Kebijakan Bidang Pertahanan Indonesia Emas 2045	5
C. Teori Tentang Kebijakan Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan	6
D. Macam dan Jenis Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan	7
E. Studi Kasus Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan	9
BAB 2 KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN	11
A. Landasan Hukum Kebijakan Industri Pertahanan	11
B. Landasan Teori Kebijakan Industri Pertahanan	13
C. Kebijakan Industri Pertahanan Laut Perbandingan di Negara Lain	15
D. Tantangan Kebijakan Industri Pertahanan ke Depan	18
E. Omnibus Law dan Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia	20
F. Produk Eksisting Industri Pertahanan yang Potensial	25
BAB 3 KEBIJAKAN PERTAHANAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN	29
A. Landasan Hukum Tentang Kebijakan Pertahanan Pengamanan Wilayah Perbatasan	29
B. Landasan Teori Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan	31
C. Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan Perbandingan di Negara Lain	33
D. Studi Kasus Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan	34
BAB 4 KEBIJAKAN PENGAMANAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR	37
A. Landasan Hukum Tentang Kebijakan Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar	38
B. Landasan Teori Kebijakan Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar	39
C. Kebijakan Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar Perbandingan di Negara Lain	40
D. Studi Kasus Kebijakan Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar	41
E. Pembelajaran Lepasnya Pulau Sepadan dan Ligitan	42
BAB 5 KEBIJAKAN WILAYAH PERTAHANAN	45
A. Landasan Hukum Tentang Kebijakan Wilayah Pertahanan	47
B. Landasan Teori Kebijakan Wilayah Pertahanan	49
C. Kebijakan Wilayah Pertahanan Perbandingan di Negara Lain	50

D. Studi Kasus Kebijakan-Kebijakan Wilayah Pertahanan	54
E. Permasalahan Kebijakan Wilayah Pertahanan di Indonesia	56
BAB 6 KEBIJAKAN LOGISTIK PERTAHANAN	61
A. Landasan Kebijakan Logistik Pertahanan	63
B. Landasan Teori Kebijakan Logistik Pertahanan	64
C. Perbandingan Logistik Pertahanan di Negara Lain	66
D. Studi Kasus Kebijakan Logistik Pertahanan	67
BAB 7 KEBIJAKAN ANGGARAN DAN	
PENGAWASAN BIDANG PERTAHANAN	71
A. Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Pertahanan	71
B. Landasan Hukum Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Bidang Pertahanan	72
C. Landasan Teori Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Bidang Pertahanan	74
D. Studi Kasus Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Bidang Pertahanan	75
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB 1

KEBIJAKAN KERJASAMA

INTERNASIONAL BIDANG PERTAHANAN

Dalam era globalisasi dan dinamika ancaman keamanan yang semakin kompleks, kerjasama internasional di bidang pertahanan menjadi elemen strategis yang vital. Indonesia, sebagai negara dengan posisi geopolitik yang strategis, menghadapi berbagai tantangan keamanan yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga regional dan global. Oleh karena itu, kebijakan kerjasama internasional di bidang pertahanan dirumuskan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan nasional melalui sinergi dengan negara lain dan organisasi internasional¹.

Tujuan:

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapabilitas dan kesiapan pertahanan nasional melalui aliansi strategis dan kemitraan.
2. Meningkatkan pertukaran informasi intelijen dan teknologi militer.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui latihan bersama dan program pendidikan.
4. Mendukung stabilitas dan perdamaian regional serta global.

Strategi Implementasi:

Aliansi dan Kemitraan Strategis:

1. Menjalin dan memperkuat aliansi dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan lainnya.
2. Mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam latihan militer bersama serta operasi perdamaian internasional.
3. Pertukaran Informasi dan Teknologi:
4. Meningkatkan kerjasama dalam bidang intelijen untuk menghadapi ancaman terorisme, keamanan siber, dan kejahatan lintas negara.
5. Melakukan transfer teknologi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan negara-negara maju dalam bidang pertahanan.

¹Kemenkomarves RI, <https://jdih.maritim.go.id/uu-32023-pengesahan-perjanjian-kerja-sama-bidang-pertahanan-antara-ri-singapura>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

BAB 2

KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

Dengan berkembangnya dinamika global yang semakin kompleks dan beragam, keamanan dan kedaulatan suatu negara menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran. Industri pertahanan memegang peranan vital dalam mendukung upaya tersebut. Kebijakan industri pertahanan dirancang untuk memperkuat kemampuan militer melalui pengembangan teknologi, produksi peralatan militer, dan pengurangan ketergantungan pada impor.⁹

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan industri pertahanan, terutama dalam konteks Indonesia yang tengah berupaya mencapai kemandirian strategis di bidang pertahanan. Visi Indonesia Emas 2045 menuntut kesiapan pertahanan yang kokoh, didukung oleh industri pertahanan yang mandiri dan maju.

Kebijakan ini meliputi berbagai aspek mulai dari investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), kemitraan strategis dengan negara dan perusahaan internasional, penguatan industri lokal, penerapan regulasi yang mendukung, hingga pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan yang inovatif, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan militer nasional.

A. LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

Kebijakan industri pertahanan Indonesia didasarkan pada berbagai landasan hukum yang memberikan kerangka kerja bagi pengembangan, regulasi, dan implementasi industri pertahanan nasional. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama yang menjadi dasar bagi kebijakan industri pertahanan di Indonesia:¹⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 30: Menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 27 Ayat (3): Menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

⁹ KKIP, <https://www.kkip.go.id/tentang-kami/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

¹⁰

Setneg

RI,

https://www.setneg.go.id/view/index/komite_kebijakan_industri_pertahanan_1 diakses tanggal 13 Mei 2024

BAB 3

KEBIJAKAN PERTAHANAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

Wilayah perbatasan memiliki arti strategis yang sangat penting bagi kedaulatan negara. Tidak hanya sebagai garis pemisah antara negara, tetapi juga sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Indonesia dengan negara tetangga. Pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif dan efisien akan menjamin integritas teritorial, keamanan nasional, serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di daerah perbatasan.¹⁴

Kebijakan pertahanan pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup keamanan non-tradisional, pembangunan infrastruktur, serta kerjasama internasional. Dalam dokumen ini, kami mencoba merangkum berbagai strategi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang di wilayah perbatasan, mulai dari penguatan pos perbatasan, peningkatan patroli, hingga pengembangan kerjasama dengan negara tetangga.

A. LANDASAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

Dasar hukum kebijakan pertahanan pengamanan wilayah perbatasan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan teknis lainnya. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang terkait dengan kebijakan tersebut:¹⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 25A: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang."

¹⁴ Kemensesneg RI,
https://www.setneg.go.id/view/index/badan_nasional_pengelola_perbatasan_1 diakses
tanggal 1 Mei 2024

¹⁵ B.A. Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-wilayah-indonesia-lt623c508fde9c6/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

BAB 4

KEBIJAKAN PENGAMANAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Kebijakan pengamanan pulau-pulau kecil terluar menjadi salah satu fokus penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah maritim suatu negara. Pulau-pulau kecil terluar sering kali rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk ancaman dari negara asing yang mengklaim wilayah perairan terdekat, kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, dan masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terpadu untuk mengamankan pulau-pulau kecil terluar.¹⁹

Deskripsi kebijakan pengamanan pulau-pulau kecil terluar mencakup beberapa aspek penting:

Penguatan Keberadaan Fisik: Pemerintah melakukan penguatan infrastruktur fisik di pulau-pulau kecil terluar, termasuk pembangunan pos pengamanan, pangkalan militer, dan fasilitas komunikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran negara di wilayah tersebut dan memberikan deteksi dini terhadap ancaman potensial.

Peningkatan Patroli dan Pengawasan: Melakukan patroli reguler dan pengawasan terhadap perairan di sekitar pulau-pulau kecil terluar menggunakan kapal patroli, pesawat udara, dan teknologi pengawasan seperti radar dan kamera. Hal ini bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal dan mengidentifikasi ancaman potensial dengan cepat.

Penguatan Kerjasama Regional: Negara yang memiliki pulau-pulau kecil terluar sering kali menjalin kerjasama regional dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan bersama. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan peningkatan koordinasi operasional antar negara.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pengamanan pulau-pulau kecil terluar dengan membentuk kelompok keamanan rakyat, memberikan pelatihan keamanan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan wilayah.

¹⁹ BNPP, <https://bnpp.go.id/berita/pengamanan-pulau-kecil-terluar-di-perbatasan-negara>, diakses tanggal 14 Mei 2024.

BAB 5

KEBIJAKAN WILAYAH PERTAHANAN

Kebijakan wilayah pertahanan merupakan rangkaian tindakan, strategi, dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, serta keamanan nasional dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari kekuatan militer, intelijen, diplomasi, hingga kerjasama internasional. Berikut adalah deskripsi tentang kebijakan wilayah pertahanan:²¹

a. Tujuan Utama

- 1) Melindungi Kedaulatan: Memastikan bahwa wilayah dan perbatasan negara tidak dilanggar oleh pihak asing.
- 2) Menjaga Integritas Teritorial: Mencegah dan mengatasi setiap ancaman yang dapat mengganggu kesatuan dan keutuhan wilayah negara.
- 3) Keamanan Nasional: Menjamin keamanan warga negara dari ancaman fisik, baik itu dari militer asing, kelompok teroris, atau ancaman lainnya.

b. Komponen Utama

- 1) Militer: Pengembangan dan pemeliharaan angkatan bersenjata yang kuat dan siap tempur. Ini mencakup pelatihan, persenjataan, teknologi, dan strategi militer.
- 2) Intelijen: Pengumpulan dan analisis informasi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman sebelum menjadi masalah besar.
- 3) Pertahanan Sipil: Mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk tanggap darurat dalam situasi krisis, seperti serangan, bencana alam, atau kerusuhan.
- 4) Diplomasi: Kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional serta global.

²¹ BRIN, <https://www.brin.go.id/news/113199/brin-bahas-kebijakan-penataan-wilayah-pertahanan-negara>, diakses tanggal 14 Mei 2024

BAB 6

KEBIJAKAN LOGISTIK PERTAHANAN

Kebijakan Logistik Pertahanan adalah serangkaian peraturan, strategi, dan prosedur yang diterapkan oleh suatu negara untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Ini mencakup pengelolaan aliran material, personel, informasi, dan layanan dari titik asal ke titik penggunaan, baik selama masa damai maupun konflik. Berikut adalah beberapa komponen utama dari kebijakan logistik pertahanan:²²

1. Pengadaan dan Penyediaan Sumber Daya

Kebijakan logistik pertahanan melibatkan proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung operasi militer, termasuk:

Peralatan dan Persenjataan: Pembelian, pemeliharaan, dan penggantian peralatan militer seperti kendaraan, pesawat, kapal, senjata, dan amunisi.
Perbekalan dan Material: Penyediaan barang-barang seperti bahan bakar, suku cadang, makanan, pakaian, dan perlengkapan medis.

2. Transportasi dan Distribusi

Proses logistik tidak hanya tentang mendapatkan barang, tetapi juga mengirimkannya ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini mencakup:

Transportasi Militer: Penggunaan berbagai moda transportasi (darat, laut, udara) untuk mengangkut pasukan dan material.

Rantai Pasokan: Sistem distribusi yang memastikan aliran barang yang efisien dari gudang ke unit yang membutuhkan di garis depan atau lokasi operasi lainnya.

3. Manajemen Persediaan

Kebijakan ini mencakup pengelolaan persediaan untuk memastikan bahwa barang-barang penting selalu tersedia, tetapi tanpa menumpuk persediaan berlebih yang dapat membebani biaya dan ruang.

Inventarisasi: Penggunaan sistem manajemen inventaris untuk melacak barang-barang yang masuk dan keluar.

Pergudangan: Penyimpanan yang efisien dan aman untuk peralatan dan perbekalan.

²² Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/itjen/inspektorat-logistik>, diakses tanggal 14 Mei 2024

BAB 7

KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAHANAN

Kebijakan anggaran dan pengawasan bidang pertahanan adalah kerangka kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur alokasi dana, pengelolaan keuangan, dan pengawasan pengeluaran yang berkaitan dengan sektor pertahanan suatu negara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan penggunaan yang efisien, efektif, dan akuntabel dari sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk keperluan pertahanan negara. Ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam menjaga keamanan nasional.²⁵

A. KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN PERTAHANAN

Kebijakan anggaran dan pengawasan bidang pertahanan di Indonesia merujuk pada kerangka kerja yang mengatur alokasi dana, pengelolaan keuangan, dan pengawasan pengeluaran yang terkait dengan pertahanan negara. Hal ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Alokasi Anggaran Pertahanan:

Pemerintah Indonesia menentukan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk keperluan pertahanan dalam anggaran negara. Dana ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembelian peralatan militer, pemeliharaan fasilitas pertahanan, operasi militer, dan pelatihan personel.

2. Prioritas Pengeluaran:

Dana anggaran pertahanan dialokasikan berdasarkan prioritas nasional dan keamanan. Hal ini mencakup modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pengadaan sistem pertahanan udara, pembangunan pangkalan militer, dan pemeliharaan infrastruktur pertahanan.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas:

Kebijakan ini menetapkan standar pengawasan dan akuntabilitas yang ketat terhadap pengeluaran dana pertahanan. Ini mencakup pembentukan lembaga pengawasan, audit rutin, serta pelaporan yang

²⁵ Kemenkeu RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>, diakses tanggal 14 Mei 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Arad, Uzi (2018). *National Security: The Israeli Experience*. State University of New York Press.
- Arad, Uzi (2018). *National Security: The Israeli Experience*. State University of New York Press.
- B.A. Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-wilayah-indonesia-lt623c508fde9c6/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- BNPP, <https://bnpp.go.id/berita/pengamanan-pulau-kecil-terluar-di-perbatasan-negara>, diakses tanggal 14 Mei 2024.
- BRIN, <https://www.brin.go.id/news/113199/brin-bahas-kebijakan-penataan-wilayah-pertahanan-negara>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Budgeting for National Defense: Allocating Resources in an Era of Fiscal Constraints
- Chairil Nur Siregar, Sutiadi Rahmansyah, Epin Saepudin*, <https://jurnal.unpad.ac.id/sosio/global/article/view/23933>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Civil-Military Relations in National Security Policy: A Comparative Analysis
- CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220926105707-14-374915/tantangan-membumikan-industri-pertahanan-di-indonesia>, diakses tanggal 13 Mei 2024
- CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220926105707-14-374915/tantangan-membumikan-industri-pertahanan-di-indonesia>, diakses tanggal 13 Mei 2024
- Council on Foreign Relations - National Security. (<https://www.cfr.org/topic/national-security>)
- Department of Defense (United States). (<https://www.defense.gov/>)
- Evaluating the Effectiveness of National Defense Strategies: Case Studies and Methodological Approaches"
- Fisip UI, <https://fisip.ui.ac.id/en/implementasi-kebijakan-industri-pertahanan-indonesia-dalam-mendukung-pertahanan-udara/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Fisip UI, <https://fisip.ui.ac.id/en/implementasi-kebijakan-industri-pertahanan-indonesia-dalam-mendukung-pertahanan-udara/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Gramdia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/kerja-sama-internasional/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

Hernandos, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/40856>, diakses tanggal 13 Mei 2024

Humanitarian Interventions and National Security: Legal and Ethical Considerations"

Inspektorat Subar, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 14 Mei 2024

Inspektorat Subar, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 14 Mei 2024

Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (2019). "National Security Strategy 2020 of India: New Vision, New Direction.

Institute for National Security Studies (Israel). (<https://www.inss.org.il/en/>)

Jones, Emily R. (2019). "National Security and Public Health: Challenges and Opportunities." *International Journal of Health Policy and Management*, 8(9), 517-519.

Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/baranahan/2024/03/06/rapim-uo-kemhan-tahun-2024.html>, diakses tanggal 3 Mei 2024

Kemenkeu RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>, diakses tanggal 14 Mei 2024

Kemenkeu RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>, diakses tanggal 14 Mei 2024

Kemenkomarves RI, <https://jdih.maritim.go.id/uu-32023-pengesahan-perjanjian-kerja-sama-bidang-pertahanan-antara-ri-singapura>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

Kemensesneg RI, https://www.setneg.go.id/view/index/badan_nasional_pengelola_perbatasan_1 diakses tanggal 1 Mei 2024

Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/itjen/inspektorat-logistik>, diakses tanggal 14 Mei 2024

Kemlu RI, https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral, diakses tanggal 1 Mei 2024.

Kemlu RI, https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral, diakses tanggal 1 Mei 2024.

Khairul Fahmi, <https://news.detik.com/kolom/d-5810714/melihat-cadangan-logistik-pangan-dari-sudut-pandang-pertahanan> diakses tanggal 14 Mei 2024

Kim, Sung Hee (2018). "National Security: Fundamental Principles and Global Challenges." *Asian Journal of Political Science*, 26(2), 157-174.

KKIP, <https://www.kkip.go.id/tentang-kami/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

Meese, Michael J., Kugler, Richard L., & Matthews, F. Matt (2019). *Understanding National Security*. Routledge.

Ministry of Defence (India). (<https://mod.gov.in/>)

Ministry of Defence (United Kingdom). (<https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence>)

National Security Policy: Challenges and Opportunities in the 21st Century

O'Hanlon, Michael (2019). *National Security: A Jeremiad*.

Public Opinion and National Security Policy: Understanding the Dynamics of Support and Opposition

Regional Security Cooperation and Collective Defense: Case Studies and Best Practices

Renshon, Stanley A., Suedfeld, Peter, & Ladd, Everett (2017). *National Security in the Obama Administration: Reassessing the Bush Doctrine*. Palgrave Macmillan.

Renshon, Stanley A., Suedfeld, Peter, & Ladd, Everett (2017). *National Security in the Obama Administration: Reassessing the Bush Doctrine*. Palgrave Macmillan.

Sandy Nur, <https://ipsh.brin.go.id/2013/01/22/kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan/>, diakses tanggal 14 Mei 2024.

Sandy Nur, <https://ipsh.brin.go.id/2013/01/22/kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan/>, diakses tanggal 14 Mei 2024

Sasmini, <https://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/>, diakses tanggal 14 Mei 2024.

Sjafrie Sjamsudien, <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/24/tni-harus-siap-perang-berlarut>, diakses tanggal 14 Mei 2024

Smith, John A. (2020). "The Role of National Security in Economic Development." *Journal of Security Sector Management*, 12(2), 135-150.

Snow, Donald M. (2018). *National Security: Policymaking and Implementation*. Oxford University Press.

Strategic Defense Planning: Lessons Learned and Future Directions"
Making: Challenges and Opportunities"

The Role of Technology in Shaping National Security Policy: Trends and Implications.

The White House (2017). "National Security Strategy of the United States of America."

Tni.mil.id, <https://tni.mil.id/view-2707-diplomasi-pertahanan-indonesia-as.html>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

Tommy Amin Santoso, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10305>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Edisi 2

Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang dinamika kebijakan pertahanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di era modern. Dengan fokus pada beragam aspek penting, mulai dari kerjasama pertahanan hingga pengawasan anggaran, buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana suatu negara membangun dan mempertahankan keamanan nasionalnya. Salah satu aspek yang diteliti dalam buku ini adalah kerjasama pertahanan antarnegara. Melalui studi kasus dan analisis perbandingan, pembaca diajak untuk memahami pentingnya kerjasama bilateral dan multilateral dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, buku ini juga membahas peran penting industri pertahanan dalam memperkuat kapabilitas pertahanan suatu negara, serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan industri pertahanan yang mandiri dan inovatif. Wilayah perbatasan dan wilayah pertahanan juga menjadi fokus penting dalam buku ini. Dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan keamanan regional, pembaca akan diberikan wawasan tentang strategi pertahanan yang efektif dalam mengamankan wilayah perbatasan dan wilayah strategis negara. Selain itu, buku ini juga membahas peran pulau-pulau kecil terluar dalam pertahanan negara. Melalui analisis terperinci, pembaca akan memahami bagaimana pulau-pulau kecil terluar dapat menjadi aset strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara, serta tantangan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan pulau-pulau tersebut. Terakhir, buku ini menyoroti pentingnya kebijakan anggaran dan pengawasan dalam bidang pertahanan. Dengan menggali berbagai faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran pertahanan.



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-194-4

